

RUU APBN 2008 Disepakati, Anggaran Pendidikan Rendah

Rabu, 10 Oktober 2007

JAKARTA (Suara Karya): Semua fraksi DPR akhirnya menyepakati rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RUU APBN) 2008 menjadi UU. Namun sejumlah fraksi memberi catatan dan nota keberatan atas rendahnya alokasi anggaran pendidikan.

DPR dan pemerintah menyepakati pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 781,354 triliun. Terdiri atas penerimaan pajak Rp 591,978 triliun, pendapatan negara bukan pajak Rp 187,236 triliun, dan penerimaan hibah Rp 2,139 triliun. Untuk penerimaan pajak dalam negeri, disepakati Rp 569,971 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 22,067 triliun.

Belanja negara per 2008 mencapai Rp 854,660 triliun; meliputi belanja pemerintah pusat Rp 573,430 triliun, dan anggaran ke daerah Rp 281,229 triliun. Belanja pusat terdiri atas belanja pegawai Rp 128,169 triliun, belanja barang Rp 52,397 triliun, belanja modal Rp 101,538 triliun, pembayaran bunga utang Rp 91,365 triliun, subsidi Rp 97,874 triliun, belanja sosial Rp 67,402 triliun, dan belanja lain-lain Rp 34,683 triliun.

Sedangkan belanja ke daerah terdiri atas dana perimbangan Rp 266,780 triliun, serta dana otonomi daerah dan penyesuaian Rp 14,449 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran mencapai Rp 73,3 triliun atau 1,7 persen dari PDB. Defisit akan dibiayai oleh perbankan dalam negeri Rp 300 miliar, privatisasi Rp 1,5 triliun, penjualan aset program restrukturisasi perbankan Rp 600 miliar, penerbitan surat berharga (neto) Rp 91,575 triliun, dana investasi pemerintah (minus) Rp 4 triliun, penarikan pinjaman luar negeri Rp 42,989 triliun, serta pembayaran cicilan pokok dan bunga (minus) Rp 59,658 triliun.

Asumsi pokok yang digunakan dalam APBN 2008 adalah pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, inflasi 6 persen, nilai tukar Rp 9.100 per dolar AS, bunga SBI 3 bulan 7,5 persen, harga minyak 60 dolar AS per barel, lifting minyak 1.034 juta barel per hari, dan PDB nominal Rp 4.306,607 triliun.

Merespons anggaran pendidikan, Juru Bicara Fraksi Persatuan Pembangunan, Lukman Hakiem mengatakan agar tahun depan menjadi tahun terakhir alokasi anggaran di bawah 20 persen.

Dalam APBN 2008, anggaran pendidikan sekitar Rp 48 triliun atau 12 persen dari APBN, tidak termasuk gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan. "Kita minta agar tahun depan menjadi tahun terakhir alokasi anggaran di bawah 20 persen," kata Lukman Hakiem.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Tjatur Sapto Edy, minta pemerintah bekerja keras meningkatkan anggaran yang ada saat ini. Sedangkan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, Ali Masykur Musa, mengatakan anggaran pendidikan yang dicantumkan dalam APBN 2008 melanggar UUD 45.

Dia khawatir, kebiasaan melanggar UUD 45 akan memberi contoh yang tidak baik kepada komponen bangsa lainnya. "Jika ini disahkan, saya mendorong Mendagri untuk melakukan judicial review dan MK (Mahkamah Konstitusi) harus memberi peringatan yang sangat tegas karena setiap tahun selalu dilanggar," katanya.

Menanggapi hal itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah dan DPR menyadari hal itu. "Memang itu risiko yang pemerintah harus hadapi," katanya.

Menurut Menkeu, dalam pembahasan dengan DPR, seluruh opsi dibuka, sehingga opsi yang diambil merupakan sesuatu yang telah dihitung dengan sadar dan dipertimbangkan seluruh aspeknya. Dan, kajian interpretasi atas definisi anggaran

pendidikan harus dilakukan, termasuk konsekuensinya terhadap sisi anggaran, menyebabkan tujuan nasional tidak tercapai.

Menkeu menjelaskan, pemerintah menghargai dukungan Dewan terhadap perlunya mengedepankan penyediaan anggaran pendidikan yang memadai dalam upaya memenuhi ketentuan UUD 1945. "Sekalipun demikian, mengingat kemampuan keuangan negara masih sangat terbatas dan adanya tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mendesak lainnya yang tidak dapat dihindarkan, peningkatan anggaran pendidikan belum dapat sepenuhnya memenuhi amanat UUD 45," katanya.

Minyak

Menkeu ingatkan, penerimaan migas perlu mendapat perhatian ekstra, karena faktor realisasi lifting minyak dan fluktuasi harga minyak internasional. Harus ada upaya keras agar APBN 2008 tidak terkena dampak fiskal yang signifikan.

"Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pencapaian lifting minyak menghadapi banyak kendala, seperti bencana alam dan banjir. Tidak tercapainya lifting minyak akan berdampak signifikan pada APBN, melalui membengkaknya defisit anggaran," kata Menkeu.

Dia menambahkan, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan perencanaan kontijensi, antara lain dengan penyediaan dana cadangan dalam jumlah yang cukup. "Selain itu, perubahan harga minyak di pasar internasional yang volatilitasnya sangat tinggi bisa berdampak cukup signifikan terhadap pelaksanaan APBN 2008," katanya. (Rully)